



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE TAHUN 2024

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT



Sinergi untuk Indonesia Maju

KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga seluruh agenda tahapan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dilaksanakan pada Tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Besar harapan kami bahwa hasil evaluasi SPBE tahun 2024 dapat menggambarkan progres kemajuan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga memberikan panduan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan penerapan SPBE yang selaras dengan kebijakan nasional. Dengan semangat tersebut, maka dampak terciptanya layanan SPBE berkualitas, terintegrasi, dan berdaya guna yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi masyarakat luas dapat diwujudkan secara konkret.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas upaya yang telah dilakukan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan progres penerapan SPBE, serta sinergi yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional dan Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, sehingga pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar.

Jakarta, 1 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata
Laksana

NIP. 197208081996032001

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi SPBE ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.

Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interview, serta Penilaian Visitasi (pada lokus tertentu).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses



Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses



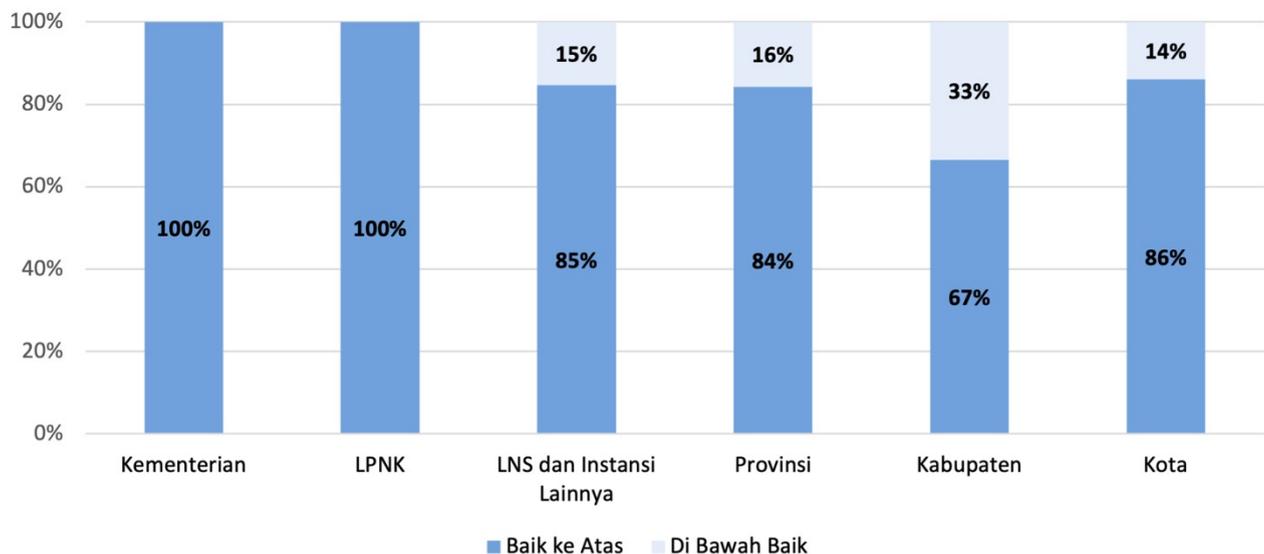
EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																				
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NILAI INDEKS</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 – 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 – < 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 – < 3,5</td> <td>Baik *)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 – < 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>< 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang		
NO	NILAI INDEKS		PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0		Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2		Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5		Baik *)																			
4	1,8 – < 2,6		Cukup																			
5	< 1,8		Kurang																			
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																					
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%																					
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%																					
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																					
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%																					
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%																					
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																					
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																					
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%																					
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																					
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																					

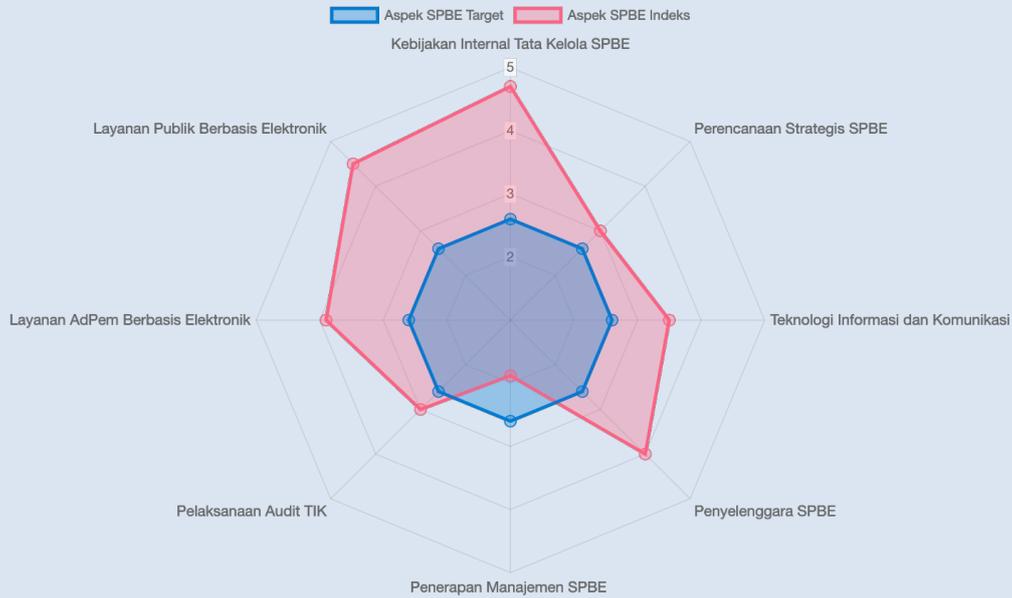
*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-Rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS dan Instansi Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	3,12	4,03	3,82	3,37	3,42	2,45	3,39
Domain Kebijakan	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	2,51	3,64
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	3,23	3,64
Domain Tata Kelola	2,62	3,92	3,65	3,11	3,07	1,69	2,94
Perencanaan Strategis	2,41	3,74	3,68	3,01	2,84	1,54	2,60
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75	4,06	3,75	3,11	3,26	1,76	3,10
Penyelenggaraan SPBE	2,80	4,00	3,40	3,32	3,14	1,85	3,31
Domain Manajemen	1,86	2,87	2,61	2,31	2,17	1,13	2,03
Penerapan Manajemen SPBE	1,91	2,96	2,68	2,38	2,19	1,16	2,09
Audit TIK	1,73	2,64	2,44	2,13	2,12	1,07	1,88
Domain Layanan SPBE	3,78	4,44	4,26	3,81	3,98	3,32	4,05
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,77	4,35	4,20	3,90	3,95	3,40	3,99
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,80	4,58	4,36	3,67	4,04	3,21	4,15

Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2024



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	3,7
Domain Kebijakan SPBE	4,70
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	<i>4,70</i>
Domain Tata Kelola SPBE	3,40
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	<i>3,00</i>
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	<i>3,50</i>
<i>Penyelenggara SPBE</i>	<i>4,00</i>
Domain Manajemen SPBE	2,18
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	<i>1,88</i>
<i>Audit TIK</i>	<i>3,00</i>
Domain Layanan SPBE	4,14
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	<i>3,90</i>
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	<i>4,50</i>

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah dengan adanya Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE, Kebijakan Internal Manajemen Data, Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE, Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra, Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi, Kebijakan Internal Audit TIK, dan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE.

- Kekuatan

Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola ini dapat terlihat adanya Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Manajemen Keamanan Informasi, Audit TIK, dan Tim Koordinasi SPBE menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE dibuktikan dengan adanya: - SK Kebijakan Arsitektur dan Peta Rencana Tahun 2024, dan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 828 Tahun 2024 tentang Arsitektur Dan Peta Rencana Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat merupakan kebijakan terkait Arsitektur dan Peta Rencana SPBE. - Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 802 Tahun 2024 tentang Pedoman Manajemen SPBE Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagai dasar hukum terkait Manajemen SPBE. - Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 803 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan Aplikasi SPBE Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terkait Kebijakan Pembangunan Aplikasi. - Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Standar Operasional Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat yang mengatur Layanan Pusat Data, Jaringan Intra, dan Sistem Penghubung Layanan. - Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 857 Tahun 2024 Tentang Pedoman Audit TIK SPBE. - Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Tim Pengelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024 yang merupakan kebijakan terkait Tim Koordinasi SPBE.

- Kelemahan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tidak memiliki kelemahan pada aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah dengan adanya Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE, dan Inovasi Proses Bisnis SPBE.

- Kekuatan

Pada Aspek Perencanaan Strategis ini dapat terlihat adanya Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Seluruh Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK dan telah direviu serta dievaluasi.

- Kelemahan

Namun di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat masih belum melakukan perbaikan pada Proses Bisnis sebagai bentuk penerapan Inovasi Proses Bisnis.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah dengan adanya Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, dan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan.

- Kekuatan

Pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi ini dapat terlihat adanya Layanan Pusat Data dan Layanan Jaringan Intra menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Layanan pusat data sudah dimanfaatkan oleh seluruh unit kerja dan mendukung integrasi dengan Pusat Data Nasional. Selain itu, layanan ini telah ditinjau, dievaluasi, dan ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga menerapkan layanan jaringan Intra secara menyeluruh, mengatur interkoneksi dan akses dengan Jaringan Intra IPPD lainnya atau Jaringan Intra Pemerintah, serta melakukan tinjauan dan evaluasi terhadap operasionalnya.

- Kelemahan
Namun di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat masih belum terlihat penggunaan sistem penghubung layanan di seluruh unit kerja berdasarkan bukti dukung yang disampaikan.

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggara SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah dengan adanya Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE, dan Kolaborasi Penerapan SPBE.

- Kekuatan
Pada Aspek Penyelenggara SPBE ini dapat terlihat adanya Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE dan Kolaborasi Penerapan SPBE menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Tim Koordinasi SPBE IPPD telah mengkomunikasikan dan mengoordinasikan tugas serta program kerja kepada seluruh unit kerja atau perangkat daerah. Selain itu, juga melakukan tinjauan dan evaluasi terhadap tugas dan program tersebut. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkolaborasi dengan membentuk Forum Satu Data Sulawesi Barat. Dalam penerapan SPBE, kolaborasi dilakukan bersama Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat melalui penyelenggaraan, penyediaan, dan pengembangan data informasi. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi dan tugas kelembagaan masing-masing, yang didukung dengan nota kesepahaman dan pertemuan rutin dalam berbagai kegiatan.
- Kelemahan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tidak memiliki kelemahan pada Aspek Penyelenggara SPBE

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah dengan adanya Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE, Penerapan Manajemen Pengetahuan, Penerapan Manajemen Perubahan, dan Penerapan Manajemen Layanan SPBE.

- Kekuatan
Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE ini dapat terlihat adanya Penerapan Manajemen Layanan SPBE yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah melaksanakan Manajemen Layanan SPBE untuk seluruh proses terkait, didukung oleh penggunaan Sistem Aplikasi Manajemen Layanan. Selain itu, penerapan manajemen layanan telah ditinjau dan dievaluasi.
- Kelemahan
Namun di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat masih belum menerapkan manajemen risiko, manajemen data, manajemen aset TIK, Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE, dan manajemen perubahan. Program kegiatan yang dilakukan belum selaras dengan peta rencana atau belum dilaksanakan oleh seluruh unit kerja.

F. Pelaksanaan Audit TIK

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Pelaksanaan Audit TIK yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah dengan adanya Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE, dan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.

- Kekuatan
Pada Aspek Pelaksanaan Audit TIK ini belum terlihat adanya pelaksanaan audit yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Pelaksanaan audit dilakukan oleh auditor internal.
- Kelemahan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tidak memiliki kelemahan pada Aspek Pelaksanaan Audit TIK.

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah dengan adanya Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Layanan Kinerja Pegawai.

- Kekuatan
Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya layanan keuangan, perencanaan, penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Kepegawaian, Kearsipan Dinamis, Pengawasan Internal Pemerintah, dan Kinerja Pegawai yang menjadi

kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Kekuatan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik ini dibuktikan dengan adanya integrasi/kolaborasi pada layanan SPBE tersebut.

- Kelemahan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tidak memiliki kelemahan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah dengan adanya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektor 2, dan Layanan Publik Sektor 3.

- Kekuatan
Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik ini dapat terlihat seluruh layanan menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Kekuatan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dibuktikan dengan adanya integrasi/kolaborasi pada seluruh layanan publik berbasis elektronik. Selain itu, telah dilakukan pengembangan berupa penambahan fitur atau optimalisasi kebijakan pada layanan data terbuka dan layanan publik sektor 1, serta layanan publik sektor 2 yang mendukung RB tematik.
- Kelemahan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tidak memiliki kelemahan di Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik.

REKOMENDASI

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata Kelola, manajemen, dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, sudah dapat menggambarkan predikat Sangat Baik dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan penerapan SPBE pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat meliputi Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang komprehensif, seperti Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, dan Pembangunan Aplikasi, didukung oleh berbagai keputusan gubernur, menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola SPBE. Adanya keterpaduan rencana dan anggaran yang telah dikonsultasikan, direviu, dan dievaluasi memperkuat implementasi SPBE. Layanan pusat data dan jaringan Intra yang dimanfaatkan oleh seluruh unit kerja mendukung interkoneksi dengan Pusat Data Nasional dan Jaringan Intra Pemerintah. Kolaborasi dengan Forum Satu Data dan Badan Pusat Statistik serta keberadaan Tim Koordinasi SPBE menunjukkan sinergi antarlembaga. Penerapan sistem aplikasi manajemen layanan yang telah dievaluasi menjadi bukti pengelolaan layanan yang optimal. Integrasi dan kolaborasi pada layanan keuangan, perencanaan, penganggaran, dan lainnya menunjukkan peningkatan efisiensi administrasi pemerintahan. Pengembangan fitur pada layanan publik berbasis elektronik mendukung reformasi birokrasi tematik.

Namun di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan meliputi belum dilakukan perbaikan proses bisnis sebagai bagian dari inovasi. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan belum merata di seluruh unit kerja, berdasarkan bukti dukung yang ada. Belum menerapkan manajemen risiko, data, aset TIK, perubahan, serta peningkatan kompetensi SDM SPBE. Program kegiatan tidak sepenuhnya selaras dengan peta rencana atau belum diimplementasikan oleh seluruh unit kerja.

Apresiasi diberikan atas kebijakan SPBE yang komprehensif dan kolaborasi yang efektif antara instansi pemerintah. Upaya ini perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan. Perlu segera melakukan evaluasi dan perbaikan proses bisnis dengan mengintegrasikan inovasi sesuai kebutuhan daerah dan masyarakat. Mengoptimalkan penerapan sistem penghubung layanan di seluruh unit kerja agar mendukung integrasi lebih baik. Menerapkan manajemen risiko, data, aset TIK, dan perubahan untuk memitigasi risiko serta meningkatkan efisiensi operasional. Melakukan pelatihan dan pengembangan SDM secara berkala untuk meningkatkan kompetensi dalam mengelola SPBE. Memastikan program kerja di seluruh unit kerja sesuai dengan peta rencana SPBE untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2024
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi	5
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	5
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	5
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	5
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	4
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	5
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung	5
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	5
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi	5
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	4
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	3
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	5
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	4
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	2
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi	4
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	4
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	2
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	3
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	2
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	4
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	3
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	3
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	3
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	5
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	4
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	4

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	5
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	5
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	4



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



Sinergi untuk Indonesia Maju

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2024